

**IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* PT. MAHAKAM SUMBER JAYA
DI DESA MAKARTI KECAMATAN MARANG KAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Febri D. Moduto, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 2, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* PT. Mahakam Sumber Jaya Di Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Febri D. Moduto

NIM : 1902016034

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 2 April 2024

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 2	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 453-463	

IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. MAHAKAM SUMBER JAYA DI DESA MAKARTI KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Febri D. Moduto¹, Fajar Apriani²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn terdiri dari sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program CSR. Sumber data primer yang digunakan terdiri dari key informan yaitu Community Development and External Relation Superintendent Departement Head PT. MSJ, Community Development Section Head PT. MSJ dan Kepala Desa Makarti serta informan dari masyarakat Desa Makarti penerima program CSR. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dengan analisis data interactive model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program CSR PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti sudah terlaksana namun belum optimal. Hal tersebut berdasarkan tiga indikator yaitu dari sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi ada faktor pendukung dari program CSR ini berupa dukungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dan Pemerintah Desa Makarti, menjaga komunikasi yang baik, Pemdes Makarti mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya, dukungan masyarakat pada program CSR yang urgent dan dibutuhkan banyak orang. Untuk faktor penghambat program CSR diantaranya tidak adanya transparansi dana CSR, sistem bottom up belum maksimal, kondisi internal perusahaan berdampak pada pelaksanaan program, keterbatasan anggaran, pengadaan barang diluar desa, program kemandirian ekonomi tidak berjalan berkelanjutan, efek tambang illegal dan masyarakat tidak mau mengikuti alur pengajuan program CSR.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility, Community Development, Kesejahteraan Masyarakat, Sosial-Ekonomi*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fdmoduto@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan sebagai tanggungjawabnya ikut andil pada pengembangan kualitas hidup sekitar dalam pelaksanaannya, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di masyarakat.

Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Penjelasan mengenai Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kukar diatas, khususnya dalam industri pertambangan batubara memberikan arahan bahwa korporasi-korporasi yang bergerak dalam industri pertambangan wajib melaksanakan *CSR* karena terikat pada eksploitasi sumber daya alam dan sangat berdampak pada lingkungan sekitar. Pelaksanaan *CSR* dalam industri pertambangan diwujudkan dalam *Community Development*.

Melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), PT. Mahakam Sumber Jaya memiliki hak eksploitasi dan kepemilikan wilayah areal tambang dengan luas mencapai 20.380 Ha yang terbagi menjadi dua lokasi yaitu di Kota Samarinda seluas 2.680 Ha dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 17.700 Ha, Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas pertambangan PT. MSJ salah satunya masuk dalam wilayah Desa Makarti sebagai desa *ring 1* (terdampak langsung).

Berbagai fenomena permasalahan di Desa Makarti diantaranya membutuhkan pembinaan kepada kelompok tani berupa bibit bidang pertanian maupun peternakan sapi, minim penerangan lampu jalan, membutuhkan saluran air bersih, rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu, minim MCK. Kemudian pihak desa telah mengajukan agar ada realisasi dari PT. MSJ untuk mendapatkan bantuan bibit buah-buahan untuk pengembangan desa agrowisata dan desa pujasera, pemanfaatan danau bekas tambang untuk pengembangan budidaya ikan keramba. Permintaan dari Desa Makarti bertujuan agar Desa dapat dibina hingga mampu mandiri dan menghasilkan PAD.

Sejak kehadiran PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti, telah memberikan manfaat diantaranya penduduk desa bekerja di perusahaan tersebut, kewajiban program *CSR* meliputi pengadaan mobil *ambulance*, pengadaan alat-alat medis dan pembinaan posyandu, perbaikan sarana jalan desa, dan beberapa bentuk program hasil permintaan pemerintah Desa Makarti. Namun kewajiban Program *CSR* PT. MSJ di Desa Makarti masih belum mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang dijalankan, terutama yang berkaitan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara *sustainable* belum diterapkan atas program pembangunan yang di tekankan oleh otoritas daerah dan kebutuhan desa.

Selain itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat aktivitas tambang batubara merusak lingkungan dan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa membuat program *CSR* PT. MSJ masih belum optimal selama ini. Masyarakat sekitar menilai program *CSR* yang diberikan tidak sesuai dengan dampak yang dirasakan dan masyarakat melalui Pemerintah Desa Makarti menginginkan adanya program yang lebih menyentuh pada pemberdayaan, agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif mengenai Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat penerapan program tanggungjawab sosial perusahaan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Parker mendefinisikan : sebagai respon atas situasi yang kritis, tindakan pemerintah perlu menetapkan tujuan kebijakan publik yang spesifik atau serangkaian prinsip pada sebuah kebijakan publik pada waktu tertentu untuk menjawab situasi tersebut (Parker dalam Syahrani 2015).

Sedangkan pendapat tersebut Nasucha dalam Pasolong (2019) mengatakan bahwa kebijakan publik perlu memperhatikan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui kekuasaan pemerintah, maka peraturan hukum untuk mengambil kebijakan perlu diperhatikan dengan memperhatikan nilai-nilai yang mampu menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial dan menjadikan acuan dalam kebijakan publik.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan kekuasaan pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan menggunakan seperangkat prinsip tertentu sebagai instrumen hukum yang didasarkan pada respon terhadap dinamika sosial masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang harmonis.

Implementasi Kebijakan Publik

Van Horn dan Van Meter dalam Syahrani (2015) memberikan makna bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang mengupayakan pertimbangan menjadi tujuan yang terarah untuk mencapai suatu yang ditetapkan dengan pola operasional. Tindakan pelaksanaan ini dapat diambil oleh individu, pemerintah dan kelompok swasta untuk meggapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.

Wahab dalam Syahrani (2015) mengatakan Implementasi kebijakan dapat berupa sebuah proses, sebuah keluaran atau sebuah hasil. Jika dipandang sebagai suatu proses, implementasi dapat merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang

diinginkan secepat mungkin. Meskipun konsep hasil implementasi spesifik bersifat terprogram, hasil akhir implementasinya berupa perubahan spesifik dalam permasalahan sosial yang lebih luas dan diselesaikan oleh program tersebut.

Pemahaman tentang implementasi kebijakan uraian diatas, penulis dapat menggambarkan bahwa peyelenggaraan kebijakan merupakan upaya yang telah diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah diputuskan dalam program. Tindakan tersebut mengacu pada pola operasional agar dapat diatasi oleh suatu program yang terarah.

Corporate Social Responsibility

Untung dalam Imelda (2021) mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan dalam dunia bisnis adalah konsisten terhadap pengelolaan ekonomi berkesinambungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan tanggung jawab pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Adapun tanggungjawab sosial korporasi menurut *The World Bussiness Council for Sustainable Development* dalam Ningtyas (2022) suatu kewajiban tanggung jawab perusahaan yang berada di areal lokasi perusahaan kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR yaitu kewajiban perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup berupa peningkatan ekonomi komunitas lokal atau masyarakat setempat yang bertujuan agar perusahaan terus bertindak secara etis.

Berdasarkan pemaparan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan sebagai tanggungjawabnya dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkualitas di masyarakat setempat.

Community Development

Community development Widhagdha & Anantanyu dalam Widhagdha (2022) menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan yaitu pengembangan masyarakat sebagai tujuan pelaksanaan agar dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat secara lebih sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan pengembangan masyarakat ini secara sistematis dilakukan perusahaan melalui skema CSR yang merupakan pelaksanaannya bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban, tapi pelaksanaan CSR yang didesain untuk memecahkan masalah sosial melalui *community development*.

Sedangkan Menurut Budimanta dalam Sibarani (2022) pengembangan masyarakat adalah aktivitas untuk memperbesar akses kepada masyarakat guna mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik pada kondisi sosial dan ekonomi. Kegiatan ini diarahkan secara sistematis dan terencana terhadap program-program pihak pemerintah maupun swasta sesuai dengan program keberlanjutan meliputi pengembangan dan pemberdayaan komunitas lokal.

Penjelasan dari kedua pendapat tersebut menjelaskan bahwa *comdev* adalah program yang ditujukan untuk pemecahan masalah sosial yang diarahkan secara sistematis dan terstruktur melalui skema CSR kepada komunitas lokal melalui

program-program pengembangan dan pemberdayaan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang lebih baik.

Secara umum empat unsur strategi *comdev* pada pelaksanaan *CSR* menurut Azis dalam Sibarani (2022) yaitu : 1) *The growth strategy*, strategi pengembangan berbasis ekonomis di perdesaan, diantaranya melalui pendapatan penduduk, produktivitas pertanian, bantuan modal dan kesempatan kerja diimbangi dengan daya konsumsi masyarakatnya. 2) *The welfare strategy*, strategi menciptakan dan memperbaiki kesejahteraan diimbangi dengan pembangunan budaya dan kultur bagi masyarakatnya. 3) *The responsive strategy*, strategi menjelaskan bahwa masyarakat merumuskan kebutuhannya, selanjutnya pihak luar menanggapi dengan memberikan bantuannya. Tujuannya mempermudah usaha mandiri melalui penyediaan dan sumber bantuan modal ataupun hal-hal sesuai pada kebutuhan pembangunan. 4) *The integrated or holistic strategy*, strategi yang bersinergi dengan unsur-unsur pokok perpaduan diatas, tujuannya agar menghasilkan strategi alternatif dan terbaik. Strategi ini menyangkut tujuan secara sistematis yang mengintegrasikan seluruh komponen mengenai keberlangsungan pertumbuhan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kesimpulannya adalah empat unsur strategi diatas menjabarkan bahwa strategi pengembangan masyarakat bisa disatukan menjadi unsur strategi yang saling terkait dan membentuk pengembangan masyarakat yang lebih baik.

Definisi Konsepsional

Implementasi *corporate social responsibility* melalui *community development* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dalam sebuah program tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang berperan dalam memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh desa atau komunitas lokal guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn terdiri dari sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program *Corporate Social Responsibility*. Adapun sumber data primer hasil wawancara dari *key informan* yaitu *Community Development and External Relation Superintendent Departement Head* PT. MSJ, *Community Development Section Head* PT. MSJ dan Kepala Desa Makarti serta informan dari masyarakat Desa Makarti penerima program *CSR*. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari hasil dokumen atau arsip program *CSR* PT. MSJ,

literatur, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data *Interactive Model* yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Mahakam Sumber Jaya Di Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Sumber Daya

Suatu tahapan implementasi tidak terlepas dengan adanya pemenuhan sumber daya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020) Ketersediaan sumber daya menjadi faktor pendukung kesuksesan sebuah kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi program ditunjang pada kualitas pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain sumber daya manusia, termuat sumber daya finansial, fasilitas yang berperan mendukung pada penilaian keefektifan implementasi kebijakan. Apabila sumber daya terbatas, maka terdapat kegagalan atau tidak optimalnya hasil dari implementasi kebijakan.

Mengacu pada hasil penelitian bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam agenda kewajiban program CSR PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti, dari pihak PT. MSJ yang terlibat adalah *Department Comdev*. Sedangkan dari Pemerintah Desa Makarti adalah bidang Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pelaksanaan program sudah sangat memadai dan berkompeten sesuai keahliannya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dengan baik. Namun pada indikator sumber daya finansial dan fasilitas dijumpai masalah, karena sumber daya finansial yang kurang, berdampak pada pembangunan bantuan fasilitas terbatas sehingga fasilitas lainnya tidak terbantu dengan baik. Kurangnya pemberian dana menimbulkan program CSR PT. MSJ tidak terjalankan secara maksimal dan program CSR bidang lainnya tidak terjalankan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas terkait indikator sumber daya yang terdiri sumber daya manusia sudah sangat baik, namun dari sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas kurang optimal selama mendukung penerapan program CSR.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020) memaparkan bahwa Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana menjadi suatu kerangka dalam penyampaian informasi dalam rangka mencapai standar dan tujuan kebijakan yang efektif dimana membentuk satu kesatuan dan keseragaman (*consistency and uniformity*) dari beragam sumber bentuk informasi. Penerapan kebijakan yang efektif, standar dan tujuan kebijakan wajib dipahami secara baik oleh para pelaksana yang nantinya dikomunikasikan antar para pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pencapaian kebijakan. Semakin baik langkah

koordinasi yang dibangun baik internal maupun eksternal, maka kesalahannya dapat diminimalisir. Penyebaran informasi yang tidak sama menimbulkan interpretasi yang memuat pertentangan (*conflicting*), ini dapat mengubah standar dan tujuan kebijakan yang tidak sama (*inconsistent*).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Sebelum melaksanakan program *CSR* kepada Desa *ring* satu. Internal PT. Mahakam Sumber Jaya berkoordinasi mengenai program *CSR* bersama pimpinan pusat, tujuannya agar mengsinkronkan dengan kebijakan manajemen perusahaan mengenai bidang-bidang yang akan dijalankan. Setelah disetujui, kemudian PT. MSJ menyampaikan kepada Desa Makarti mengenai bidang yang disetujui dalam program *CSR*. Penyampaian informasi ini jelas dan meliputi nominal anggaran yang telah disetujui oleh pimpinan pusat. Bentuk koordinasi dalam sistem perumusan dan penetapan program di Desa Makarti dilaksanakan secara bermusyawarah dengan berbagai *stakeholder* diantaranya Pemerintah Desa Makarti, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Komunikasi rutin dilaksanakan satu kali setahun di bulan desember pada agenda penyusunan program *CSR*. Selain itu, pertemuan rutin setiap bulan oleh para pelaksana yaitu secara informal membahas perkembangan dan evaluasi setiap program *CSR* yang dijalankan. Kemudian terakhir yaitu Pemerintah Desa Makarti saat melaksanakan pendataan kepada masyarakat, Pemdes Makarti menyampaikan informasi kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima program *CSR*. Selain penyampaian informasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Pemdes Makarti dan Departemen *Comdev* melakukan pemantauan selama pelaksanaan, agar program tersebut berjalan sesuai yang di targetkan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa pada indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana pada implementasi program *CSR* PT. MSJ di Desa Makarti sudah terjalankan dengan baik dari penyampaian informasi internal dan eksternal serta perumusan hingga monitoring pelaksanaan program *CSR*.

3. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Guna mewujudkan keberhasilan kinerja suatu kebijakan atau program. Pusat perhatian kepada lingkungan eksternal yang kondusif perlu diprioritaskan dalam penerapan kebijakan. Sumber utama gangguan yang datang dari kegagalan sebuah program adalah tidak memperhatikan lingkungan eksternal meliputi kondisi sosial, ekonomi dan politik (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 2020).

Berdasarkan hasil penelitian pada lingkungan eksternal dari pelaksanaan program *CSR* PT. MSJ untuk kondisi ekonomi Desa Makarti belum kondusif terjalankan, Hambatannya pola pikir petani karet yaitu mencampur bahan kimia pada hasil karet, Pembentukan UPPB Karet hasil program *CSR* belum mampu mengintegrasikan kebutuhan para petani karet dan keterbatasan anggaran. Pada kondisi sosial pelaksanaan program *CSR* PT. MSJ diterima cukup kondusif pada

tatanan sosial masyarakat Desa Makarti program kebutuhan sosial berupa kebutuhan posyandu, kebutuhan lansia, saluran air bersih, beasiswa dan rehab rumah tidak layak. Kondisi politik mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kukar karena ini wajib dilaksanakan bagi perusahaan. Kondisi opini masyarakat Desa Makarti pada agenda CSR PT. MSJ cukup kondusif. Walaupun termuat tanggapan berbagai macam akibat keterbatasan anggaran namun tidak sampai ada penolakan program CSR.

Maka pemaparan diatas mengenai lingkungan eksternal pada kondisi ekonomi belum kondusif. Sedangkan kondisi sosial dan kondisi politik Desa Makarti cukup kondusif dalam pelaksanaan program CSR PT. MSJ.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara

Penerapan Program *Corporate Social Responsibility* PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti terdapat berbagai hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat selama perjalanan program ini, diantaranya :

Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Desa Makarti.
2. Menjaga komunikasi yang baik.
3. Pemerintah Desa Makarti mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya.
4. Dukungan masyarakat pada program CSR yang urgent dan dibutuhkan banyak orang.

Faktor Penghambat

1. Pelaksanaan program CSR seharusnya berjalan mengalami keterlambatan.
2. Jadwal perumusan dan penetapan program CSR mengalami keterlambatan yang seharusnya selesai pada bulan Desember.
3. Pemerintah Desa menyusun ulang program CSR di tahun berikutnya yang sudah ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan tahun ini.
4. Keterbatasan Sumber Daya Finansial.
5. Program kemandirian ekonomi tidak berjalan berkelanjutan dan tidak terlaksana dengan baik.
6. Program CSR PT .MSJ berupa pengadaan barang, barangnya tersedia di wilayah Desa Makarti, perusahaan lebih membeli barang dari luar desa.
7. Efek tambang *illegal* batubara membuat PT. Mahakam Sumber Jaya dinilai tidak bertanggung jawab oleh masyarakat desa.
8. Terdapat Masyarakat yang tidak mau mengikuti alur pengajuan program CSR PT. Mahakam Sumber Jaya tanpa jalur Pemerintah Desa Makarti.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang didapatkan peneliti terkait Program *Corporate Social Responsibility* PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya program tanggungjawab sosial perusahaan menggambarkan kewajiban perusahaan yang dijalankan kepada suatu wilayah ataupun masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas perusahaan. Kewajiban *CSR* telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan diatur juga dalam Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kemudian terdapat hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian serta faktor pendukung dan faktor penghambat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Program *CSR* PT. Mahakam Sumber Jaya di Desa Makarti sudah terlaksana namun belum optimal. Dapat dilihat dari indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia pelaksana program dilihat dari kualitas dan kuantitas sudah cukup memadai dan berkompeten. Namun sumber daya finansial dan fasilitas yang dialokasikan belum memadai.
 - b. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana telah membangun koordinasi yang baik agar dapat memonitoring tentang perkembangan dan evaluasi setiap program. Semakin baik koordinasi yang dibangun oleh PT. MSJ, maka kesalahannya akan semakin kecil terjadi di Desa Makarti
 - c. Lingkungan Ekonomi, pelaksanaan program *CSR* PT. MSJ untuk perekonomian masyarakat Desa Makarti belum terjalankan dengan baik. Lingkungan sosial pada program *CSR* PT. MSJ diterima cukup kondusif di tatanan sosial masyarakat Desa Makarti. Lingkungan politik mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerindah Desa Makarti. Kondisi opini masyarakat Desa Makarti pada program *CSR* PT. MSJ cukup kondusif, terdapat berbagai respon baik dan kurang baik dari masyarakat desa, namun tidak sampai ada penolakan program *CSR*.
2. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Desa Makarti, menjaga komunikasi yang baik, Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya dan dukungan masyarakat dalam kewajiban program *CSR* yang urgent. Faktor penghambat yakni pelaksanaan program *CSR* seharusnya berjalan mengalami keterlambatan, jadwal perumusan dan penetapan program *CSR* mengalami keterlambatan yang seharusnya selesai pada bulan desember, pemerintah desa menyusun ulang program *CSR* di tahun berikutnya yang sudah ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan tahun ini, keterbatasan dana, program

kemandirian ekonomi tidak berkesinambungan dan tidak terlaksana dengan baik, program *CSR* PT .MSJ berupa pengadaan barang, apabila tersedia di Desa Makarti, pihak PT. MSJ lebih membeli dari luar desa, efek tambang *illegal* batubara dan masyarakat tidak mengikuti alur pengajuan program *CSR* lewat Pemerintah Desa Makarti.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, dengan ini penulis memberikan saran-saran yang yang sekiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Perlu adanya transparansi berapa kewajiban dana program *CSR* PT. MSJ per tahunnya yang wajib dikeluarkan berdasarkan *profit* penjualan batubara.
2. Sebaiknya pihak PT. MSJ merencanakan program *CSR* dengan memaksimalkan sistem bottom up hasil dari masukkan masyarakat desa.
3. Pelaksanaan program *CSR* yang seharusnya berjalan mengalami keterlambatan dari internal perusahaan. Diharapkan PT. MSJ dapat memberikan komitmennya dalam melaksanakan program *CSR* sesuai perencanaan dan kesepakatan dengan pihak Desa Makarti. Sehingga tidak timbul stigma respon negatif dari masyarakat desa.
4. Jadwal perumusan dan penetapan program *CSR* mengalami keterlambatan yang seharusnya selesai pada bulan desember, akan memberi kemunduran pelaksanaan program *CSR* PT. MSJ pada Desa Makarti. Disarankan agar PT. MSJ melakukan evaluasi secara internal perusahaan dampak dari jadwal kemunduran dan membantu perusahaan untuk mengetahui dan mengantisipasi resiko yang mungkin timbul.
5. Tekait Pemerintah Desa Makarti menyusun ulang program *CSR* di tahun berikutnya yang sudah ditetapkan. Diharapkan PT. MSJ berkoordinasi secara terbuka kepada Pemerintah Desa Makarti terkait program *CSR* yang belum terlaksana. Ini dapat membantu PT. MSJ untuk menjelaskan situasi yang terjadi, dan meminta dukungan kerjasama untuk menyusun ulang program *CSR* dengan mengganti alternatif bidang lainnya.
6. Keterbatasan dana, sebaiknya program *CSR* PT. MSJ disusun atas kebutuhan desa dan memberikan manfaat berjangka panjang. Terutama pada bidang perekonomian desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menambah PAD.
7. Merekomendasikan agar PT. MSJ lebih mengfokuskan pada pengembangan ekonomi yang bermanfaat jangka panjang dan berpusat pada usaha berbasis sumber daya lokal, dan kreativitas masyarakat desa. Guna membentuk kemandirian ekonomi masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan, dan manfaat berkesinambungan hingga masa pasca tambang PT. MSJ.
8. Sebaiknya pengadaan barang PT. MSJ dapat membeli barang yang tersedia di Desa Makarti. Hal ini membantu perekonomian masyarakat desa,

memaksimalkan efisiensi dan efektivitas program *CSR*, dan meningkatkan citra atau reputasi PT. MSJ.

9. PT. MSJ perlu meningkatkan pengawasan ketat dan menindak tegas pelaku penambangan ilegal di wilayah konsesinya. Berkoordinasi dengan aparat yang berwenang dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
10. Masyarakat yang tidak mau mengikuti alur pengajuan program *CSR* PT. MSJ tanpa jalur Pemerintah Desa Makarti. Diharapkan masyarakat desa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya program *CSR* bagi pembangunan desa serta mengikuti prosedur. Dengan ini Pemerintah Desa dapat menekan kewajiban *CSR* PT. Mahakam Sumber Jaya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung : Alfabeta.
- Imelda, S. 2021. Analisis Penerapan Kebijakan Corporate Social Responsibility (*CSR*) PT. Kitadin Pada Masyarakat Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Bisnis* 9(1),63–73.
- Mahakam Sumber Jaya. 2023. *Company Profile*. Mahakam Sumber Jaya.
- Miles, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook*. Arizona State University.
- Murdiyanto. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Bandung: Rosda Karya.
- Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. 2022. Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091-1112.
- Pasolong. 2019. *Teori Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Sibarani, Togar. 2022. *Strategi & Implementasi Pengembangan Masyarakat Desa Berkelanjutan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Widhagdha, M. F., Santosa, F. J., Wardani, R. R. I. K., Retnaningsih, T. A., & Kartono, D. T. 2022. Community Development Model by Corporate Social Responsibility in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Asean Social Work Journal* 10(2) 50-55.